

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)/(*Wetboek van Strafrecht*), 1958.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (1945).

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (1984).

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (2004).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (1999).

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (2009).

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (2005).

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (2007).

Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (2018).

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (2019).

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (2020).

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (2020).

Presiden Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (2020).

Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 (2020).

Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (2018).

Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (2018).

Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)" 2019, no. 039471 (2020).

Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (2021).

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (2020).

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Peraturan Gubernur DKI Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (2020).

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah. (2020).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/307/2017 Tentang Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (2017).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (2020).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/12757/2020 Tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (2020).

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2018 Tentang Registrasi Obat (2008).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (2008).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi (2017).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (2021).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (2021). <https://tumj.tums.ac.ir/article-1-11063-fa.html>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (2021).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (2020).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (2021).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Surat Edaran HK.02.02/I/1727/2021 tentang Vaksinasi Tahap 3 Bagi Masyarakat Rentan Serta Masyarakat Umum Lainnya dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Bagi Anak Usia 12-17 Tahun (2021).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Surat Edaran HK.02.02/II/368/2021 tentang Pelaksanaan pada Kelompok Sasaran Lansia, Komorbid dan Penyintas COVID-19 serta Sasaran Tunda (2021).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK 0202/4/423/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (2021).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal baru (2020).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID -19) Pada Satuan Pendidikan (2020).

Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor: M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja / Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19 (2020).

BPOM. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No 21 tahun 2015 tentang Tata Laksana Persetujuan Uji Klinik (2015).

Government of Western Australia. Public Health Act 2016, 2020 § (2016).

United Kingdom Parliament. Coronavirus Act 2020 (2020).

United Kingdom Parliament. Public Health (Control of Disease) Act 1984 (1984).

United State of America. Americans with Disabilities Act (1990).

United State of America. Tittle VII of The Civil Rights Act (1964).

Buku:

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. Edisi 1. Jakarta: Rajawali Press, 2007.

BPOM. *Pedoman Cara Uji Klinik Yang Baik Di Indonesia*. III. Jakarta: BPOM, 2016

Dulleman, AAALF Van. *Staatsnoodrecht En Democratie*. 1st ed. Wilhelminalaan: N Samson NV, 1947.

- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Edisi 1. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Fatovic, Clement. *Outside The Law: Emergency and Executive Power*. Baltimore: The John Hopkins University Press, 2009.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Keempat. Jakarta: Kencana, 2013.
- Garner, Bryan A, ed. *Black ' S Law Dictionary*. West Publishing Company. Edisi 9. Minnesota, 2009.
- Giovanni, Distefano. "State Responsibility for Internationally Wrongful Acts." In *Fundamentals of Public International Law*, edited by Distefano Giovanni, 637–805. Leiden: Brill, 2019.
- Hunter, Nan D. *The Law of Emergencies: Public Health and Disaster Management*. Edisi 1. Burlington: Egyptian Society of Cardiology, 2009.
- Jamrozik, Euzebiusz, and Michael J Selgelid. *Ethics and Drug Resistance : Collective Responsibility for Global Public Health*. Edited by Michael J Selgelid. Switzerland: Springer, 2020.
- Keraf, Sony. *Etika Bisnis: Tuntutan Dan Relevansinya*. Edisi 1. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Leiboff, Marret, and Mark Thomas. *Legal Theories: In Principle*. Kesatu. Pymont: Lawbook Co., 2004.
- Locke, John. *Two Treatise of Government*. Nevada: The Federalist Papers Project, 2012.
- Magnis, Frans, and Suseno. *13 Tokoh Etika: Sejak Zaman Yunani Sampai Abad Ke-19*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Malone, Kevin M., and Alan R. Hinman. "Vaccination Mandates: The Public Health Imperative and Individual Rights." In *Law in Public Health Practice*, edited by Gene W. Matthews; with the assistance of Karen L. Foster. Richard A. Goodman, Mark A. Rothstein, Richard E. Hoffman, Wilfredo Lopez, 262–84. New York: Oxford University Press, 2009.
- Maroni. *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*. Edited by Sunarto. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2015.
- Muladi, Barda Arif. *Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Pound, Roscoe. *Contemporary Juristic Theory*. Kesatu. Claremont: Pamona College, 1940.

- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan. *Buku Ajar Imunisasi*. Edited by Erna Mulati, Reza Isfan, Oos Fatimah Royati, and Yuyun Widyaningsih. 2nd ed. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2015.
- Rachels, James. *Filsafat Moral*. Edisi 1. Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Rasyidi, Lilik. *Filsafat Hukum*. Edisi 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rosenstand, Nina. *The Moral of the Story: An Introduction to Ethics*. Edisi 8. New York: McGraw-Hill Education, 2017.
- Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Salman, HR Otje. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*. Edisi 1. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Stroud, Clare, Lori Nadig, and Bruce M Altevogt. *Medical Countermeasures Dispensing Emergency Use Authorization and the Postal Model: Workshop Summary*. Washington: The National Academies Press, 2010.
- Sulisworo, Dwi, Triw Wahyuningsih, and Dikdik Baehaqi Arif. *Hak Azasi Manusia (HAM): Hibah Materi Pembelajaran Konvensional 2012*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2012.

Artikel Ilmiah:

- Afandi, Dedi. "Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM." *Jurnal Ilmu Kedokteran* 2, no. 1 (2008): 14.
- Clemente-Suárez, Vicente Javier, Alberto Hormeño-Holgado, Manuel Jiménez, Juan Camilo Benitez-Agudelo, Eduardo Navarro-Jiménez, Natalia Perez-Palencia, Ronald Maestre-Serrano, Carmen Cecilia Laborde-Cárdenas, and Jose Francisco Tornero-Aguilera. "Dynamics of Population Immunity Due to the Herd Effect in the COVID-19 Pandemic." *Vaccines* 8, no. 2 (2020): 1–20.
- Cohen-Almagor, Raphael. "Between Autonomy and State Regulation: J.S. Mill's Elastic Paternalism." *Philosophy* 87, no. 4 (2012): 557–82.
- Cornell, Anna Jonsson, and Janne Salminen. "Emergency Laws in Comparative Constitutional Law – The Case of Sweden and Finland." *German Law Journal* 19, no. 2 (2018): 219–50.
- Cohen-Almagor, Raphael. "Between Autonomy and State Regulation: J.S. Mill's Elastic Paternalism." *Philosophy* 87, no. 4 (2012): 557–82.

- Cornell, Anna Jonsson, and Janne Salminen. "Emergency Laws in Comparative Constitutional Law – The Case of Sweden and Finland." *German Law Journal* 19, no. 2 (2018): 219–50.
- Cunningham, Anthony L., Thomas C. Heineman, Himal Lal, Olivier Godeaux, Roman Chlibek, Shinn Jang Hwang, Janet E. McElhaney, et al. "Immune Responses to a Recombinant Glycoprotein e Herpes Zoster Vaccine in Adults Aged 50 Years or Older." *Journal of Infectious Diseases* 217, no. 11 (2018): 1750–60.
- Day, Patricia M, Rhonda C Kines, Cynthia D Thompson, Subhashini Jagu, B Roden, Douglas R Lowy, and John T Schiller. "In Vivo Mechanisms of Vaccine-Induced Protection against HPV Infection." *Cell Host Microbe* 8, no. 3 (2010): 260–70.
- Gostin, Lawrence O., and James G. Hodge. "US Emergency Legal Responses to Novel Coronavirus: Balancing Public Health and Civil Liberties." *JAMA* 323, no. 12 (2020): 1131–32.
- Han, Yu, and Hailan Yang. "The Transmission and Diagnosis of 2019 Novel Coronavirus Infection Disease (COVID-19): A Chinese Perspective." *J Med Virol* 92, no. 6 (2020): 639–44.
- Isriawaty, fheriyal. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3 (2015): 1–10.
- Li, Yen Der, Wei Yu Chi, Jun Han Su, Louise Ferrall, Chien Fu Hung, and T. C. Wu. "Coronavirus Vaccine Development: From SARS and MERS to COVID-19." *J Biomed Sci* 27, no. 1 (2020): 1–23.
- Liu, Ying, Albert A. Gayle, Annelies Wilder-Smith, and Joacim Rocklöv. "The Reproductive Number of COVID-19 Is Higher Compared to SARS Coronavirus." *J Travel Med* 27, no. 2 (2020): 1–4.
- Lombard, M., P. P. Pastoret, and A. M. Moulin. "A Brief History of Vaccines and Vaccination." *Rev Sci Tech Off Int Epiz* 26, no. 1 (2007): 29–48.
- Mahan, Vicki L. "Clinical Trial Phases." *Int J Clin Med* 05, no. 21 (2014): 1374–83.
- Masnun, Muh. Ali, Eny Sulistyowati, and Irfa Ronaboyd. "Pelindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan." *Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2021): 35–47.
- Matompo, Osgar S. "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 57–72.

- Matompo, Osgar S. "Restrictions on Human Rights in an Emergency Perspective." *Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 57–72.
- Morens, David M., Gregory K. Folkers, and Anthony S. Fauci. "What Is a Pandemic?" *J Infect Dis* 200, no. 7 (2009): 1018–21.
- Ophinni, Youdiil, Anshari S Hasibuan, Alvina Widhani, and Suzy Maria. "COVID-19 Vaccines : Current Status and Implication for Use in Indonesia." *Indonesia Journal International Medicine* 52, no. 4 (2021): 388–412.
- Prasetio, Dicky Eko. "Tinjauan Paradigmatik Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Dalam Mewujudkan Hukum Darurat Responsif." Universitas Negeri Surabaya, 2020.
- Riedel, Stefan. "Edward Jenner and the History of Smallpox and Vaccination." *BUMC Proceedings 2005* 18 (2005): 21–25.
- Suneel, Prajapati, and GV Narasimha Kumar. "Assumption of Herd Immunity against COVID-19: A Plausibility and Hope or a Terrible Thought in Modern-Day to Save the Life." *J Infect Dis Epidemiol* 6, no. 4 (2020): 4–7.
- Susilo, Adityo, C Martin Rumende, Ceva W Pitoyo, Widayat Djoko Santoso, Mira Yulianti, Robert Sinto, Gurmeet Singh, et al. "Coronavirus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019 : Review of Current Literatures." *J Penyakit Dalam Indones* 7, no. 1 (2020): 45–67.
- Taylor, Did, Alistair C Lindsay, and Julian P Halcox. "Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1." *Nejm*, 2020, 0–2.
- Thorat, S. B., S. K. Banarjee, D. D. Gaikwad, S. L. Jadhav, and R. M. Thorat. "Clinical Trial: A Review." *Int J Pharm Sci Rev Res* 1, no. 2 (2010): 101–6.
- Ullah, Sami, Abdullah Ghodran Al-Sehemi, Jiří Jaromír Klemeš, Sanam Saqib, Sahibzada Muhammad Azib Gondal, Sidra Saqib, Akasha Arshad, et al. "A Review of the Progress of COVID-19 Vaccine Development." *Duzce Med J* 23, no. Special Issue 1 (2021): 1–23.
- Widjaja, Gunawan, and Hotmaria Hertawaty Sijabat. "Rules-Raised Ethical Issues During The COVID-19 Pandemic In Indonesia." *Sys Rev Pharm* 12, no. 21 (2021): 623–32.
- Widodo, Hananto, and Fradhana Putra Disantara. "Problematik Kepastian Hukum Darurat Kesehatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 1 (2021): 197.

Zakir, Foziyah, Farah Islam, Aamena Jabeen, and Sivakumar Sivagurunathan Moni. "Vaccine Development: A Historical Perspective." *Biomed Res J* 30, no. 3 (2019).

Internet:

Alam, Bachtiarudin. "PBHI Sebut Denda Administratif Bagi Penolak Vaksin Langgar HAM," diakses 23 April 2021. 2021. <https://www.merdeka.com/sehat/pbhi-sebut-denda-administratif-bagi-penolak-vaksin-langgar-ham.html>.

Amnesty Indonesia. "Memaksakan Vaksinasi Dengan Ancaman Pidana Merupakan Pelanggaran HAM," diakses 21 Februari 2021. 2021. <https://www.amnesty.id/memaksakan-vaksinasi-dengan-ancaman-pidana-merupakan-pelanggaran-ham/>.

Amnesty International. "Sancties," diakses 30 April 2021. 2015. <https://www.ensie.nl/amnesty-international/sancties>.

Aprilia, Zefanya. "Dari PSBB Hingga PPKM Darurat, Perjalanan Panjang Jakarta Lawan Pandemi Covid-19." *Tempo*, diakses 15 Juli 2021. 2021. https://metro.tempo.co/read/1483375/dari-psbb-hingga-ppkm-darurat-perjalanan-panjang-jakarta-lawan-pandemi-covid-19?page_num=3.

BPOM. "Penerbitan Persetujuan Penggunaan Dalam Kondisi Darurat Atau Emergency Use Authorization (EUA) Pertama Untuk Vaksin COVID-19." BPOM, diakses 2 Maret 2021. 2021. <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/584/Penerbitan-Persetujuan-Penggunaan-Dalam-Kondisi-Darurat-Atau-Emergency-Use-Authorization--EUA--Pertama-Untuk-Vaksin-COVID-19.html>.

BPOM. "Penerbitan Persetujuan Penggunaan Dalam Kondisi Darurat Atau Emergency Use Authorization (EUA) Pertama Untuk Vaksin COVID-19." BPOM, diakses 2 Maret 2021. 2021. <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/584/Penerbitan-Persetujuan-Penggunaan-Dalam-Kondisi-Darurat-Atau-Emergency-Use-Authorization--EUA--Pertama-Untuk-Vaksin-COVID-19.html>.

Center for Disease Control and Prevention. "Different COVID-19 Vaccines," CDC, diakses 5 Juni 2021. 2021. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines.html>.

CNN Indonesia. "Jokowi Resmi Batalkan Vaksinasi Berbayar," CNN, diakses 16 Juli 2021. 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210716184255-20-668809/jokowi-resmi-batalkan-vaksinasi-berbayar>.

- Corum, Jonathan, Knvul Sheikh, and Carl Zimmer. "Different Approaches to a Coronavirus Vaccine." *The New York Times*, diakses 6 Juni 2021. 2021. <https://www.nytimes.com/interactive/2020/05/20/science/coronavirus-vaccine-development.html>.
- Detiknews. "Jenis Vaksin COVID Untuk Anak Di Indonesia, Ini Penjelasannya," diakses 12 Juli 2021. 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5640442/jenis-vaksin-covid-untuk-anak-di-indonesia-ini-penjelasannya>.
- Food Drug Administration. "Emergency Use Authorization for Vaccines Explained," diakses 10 April 2021. 2020. <https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/emergency-use-authorization-vaccines-explained>.
- Gallagher, James. "Covid: Is There a Limit to How Much Worse Variants Can Get?" *BBC*, diakses 30 Juni 2021. 2021. <https://www.bbc.com/news/health-57431420>.
- Global Alliance for Vaccine and Immunization. "There Are Four Types of COVID-19 Vaccines: Here's How They Work," diakses 6 Juni 2021. 2021. <https://www.gavi.org/vaccineswork/there-are-four-types-covid-19-vaccines-heres-how-they-work>.
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. "Data Vaksinasi COVID-19 Update 30 Mei 2021," diakses 30 Mei 2021. 2021. <https://covid19.go.id/p/berita/data-vaksinasi-covid-19-update-30-mei-2021>.
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. "Peta Sebaran COVID-19," diakses 21 Mei 2021. 2021. <https://covid19.go.id/>.
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. "Peta Sebaran COVID-19 Update 18 Juli 2021," diakses 18 Juli 2021. 2021. <https://covid19.go.id/p/berita/data-vaksinasi-covid-19-update-30-mei-2021>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Program Vaksinasi COVID-19 Mulai Dilakukan, Presiden Orang Pertama Penerima Suntikan Vaksin COVID-19," diakses 1 April 2021. 2021. <http://p2p.kemkes.go.id/program-vaksinasi-covid-19-mulai-dilakukan-presiden-orang-pertama-penerima-suntikan-vaksin-covid-19/>.
- Millard, Robin. "WHO against Mandatory COVID-19 Vaccines," diakses 28 Februari 2021. 2020. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/12/08/who-against-mandatory-covid-19-vaccines-.html?src=mostviewed&pg=/>.
- Ministry of Health of Israel. "What Is a Green Pass?," diakses 24 Maret 2021. 2021. <https://corona.health.gov.il/en/directives/green-pass-info/>.
- Pradila, Muhammad Rizky. "Hasil Survei Sebut 41 Persen Masyarakat Tolak

Vaksin Covid-19, DPR: Masalah Serius,” diakses 28 Februari 2021. 2021. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011477972/hasil-survei-sebut-41-persen-masyarakat-tolak-vaksin-covid-19-dpr-masalah-serius>.

The Straits Times. “China Calls for Halt to Mandatory Covid-19 Vaccinations amid Inoculation Push,” diakses 20 April 2021. 2021. <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/china-calls-for-halt-to-mandatory-covid-19-vaccines-amid-inoculation-push>.

Velarosdela, Rindi Nuris. “Awal Mula Varian Delta Masuk Ke Jakarta Hingga Mendominasi 90 Persen Kasus Covid-19.” Megapolitan, diakses 15 Juli 2021. 2021. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/15/13220151/awal-mula-varian-delta-masuk-ke-jakarta-hingga-mendominasi-90-persen?page=all>.

Wahyuni, Natasia Christy. “Varian Delta Dominasi 78,8% Sebaran Virus Di Indonesia.” Berita Satu, diakses 9 Juli 2021. 2021. <https://www.beritasatu.com/kesehatan/797705/varian-delta-dominasi-788-sebaran-virus-di-indonesia>.

World Health Organization. “Clinical Trial.” WHO, diakses 14 April 2021. 2020. https://www.who.int/health-topics/clinical-trials/#tab=tab_1.

Yoon, Dasl. “Declining a Covid-19 Vaccine Risks Penalties in Some Countries,” 2021. <https://www.wsj.com/articles/declining-a-covid-19-vaccine-risks-penalties-in-some-countries-11613998997>.

Zain, Rizqy Amelia. “27% Penduduk Indonesia Masih Ragu Terhadap Vaksin COVID-19, Mengapa Penting Meyakinkan Mereka,” diakses 23 April 2021. 2021. <https://theconversation.com/27-penduduk-indonesia-masih-ragu-terhadap-vaksin-covid-19-mengapa-penting-meyakinkan-mereka-150172>.

Zimmer, Carl, Jonathan Corum, and Sui-Lee Wee. “Coronavirus Vaccine Tracker.” The New York Times, diakses 21 Juni 2021. 2021. <https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html>.

Lain-lain:

American Association for the International Commission of Jurists. “The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights.” New York, 1985. www.icj.org.

Food Drug Administration. “Emergency Use Authorization for Vaccines to Prevent COVID-19 Guidance for Industry.” Food Drug Administration, 2021. <https://www.fda.gov/regulatory->.

- PDPI, PERKI, PAPDI, PERDATIN, and IDAI. *PEDOMAN TATALAKSANA COVID-19*. Edited by Erlina Burhan, Agus Dwi Susanto, Sally Aman Nasution, Eka Ginanjar, Ceva Wicaksono Pitoyo, and Adityo Susilo. 3rd ed. Jakarta, 2020.
- Public Health England. “SARS-CoV-2 Variants of Concern and Variants under Investigation in England.” London, 2021.
- Public Health Ontario. “COVID-19 – What We Know So Far About... Herd Immunity.” *Synthesis*, 2021, 1–14.
- Rough, Elizabeth. “UK Vaccination Policy.” London, 2021.
- UN Human Rights Committee (HRC). “CCPR General Comment No. 29: Article 4: Derogations during a State of Emergency,” 2001.
- UNESCO. *The UNESCO Universal Declaration on Bioethics and Human Rights*. Edited by Henk A M J Have and Michele S Jean. Paris: UNESCO, 2009.
- United Nations. “The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)”. United Nation, 1976.
- United Nations. “United Nations Human Rights Declaration.” *Human Rights*, 1948, 1–8.
- WHO. “Emergency Use Listing Procedure.” *World Health Organisation*, 2020.